

DAMPAK KEBIJAKAN PERDAGANGAN GULA TERHADAP PROFITABILITAS USAHATANI TEBU : Kasus di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Oleh : Tjetjep Nurasa dan Iwan Setiajie A¹⁾

ABSTRACT

Trade policy does not only affecting the sugar cane at macro level, but also in micro level through the price mechanism of output change. The prices increases in 3 scenarios, that are the sugar price at producer price from IDR 3,410 to IDR 1,461,3 for the A scenario, to IDR 2,600 for the B scenario, to IDR 2,270 for C scenario. The advantage of sugar cane farming in district of Klaten, Central Java in planning smaller than keprasan. This is due to the expensive of preparation of crop, seed and plant, where as in keprasan does not need it, Even, the advantages of early harvest in non irrigation area in Klaten district decreased sharply. All policies scenarios causes advantage of

natura sugar cane in degradation sharply in which those scenarios cause advantages tend to negative. It means non profit nor in rice field either in non irrigated. While the crop of ratoon (keprasan), the profit decrease but non negative. This means that the farmer sugar cane will poor extremally if they are in protection tariff. Abolition policy of tariff or non-tariff is also will cause decreases profits. Therefore, the combination policy of tariff and non-tariff is still needed in order to protect farmer of sugar cane and national sugar industry.

Keyword : Farming sugar cane, trade policy.

1) Tjetjep Nurasa dan Iwan Setiajie A adalah Peneliti pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) – Departemen Pertanian

PENDAHULUAN

Kebijakan penyediaan komoditas pertanian Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu komoditas substitusi impor dan komoditas promosi ekspor. Permasalahan umum yang dihadapi oleh kelompok komoditas pertama, khususnya gula, adalah membanjirnya impor komoditas tersebut yang menyebabkan harga di pasar domestik menjadi rendah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kebijakan *unilateral* dan *strategi defensif* dengan menggunakan kebijakan proteksi pasar domestik melalui instrumen tarif dan non-tarif di mana tarif yang diterapkan sejak tahun 2003 sampai sekarang (saat kajian ini ditulis) adalah, Rp 550 per kg (setara 20%) untuk gula mentah dan Rp 700 per kg (setara 25%) untuk gula putih. Tarif tersebut sebenarnya masih jauh dibawah *bound tariff* 95% untuk gula yang diberlakukan selama 1995-2004. Instrumen non-tarif adalah pengaturan, pengawasan dan pembatasan impor.

Di masa mendatang, reformasi perdagangan dunia akan terus berjalan di mana semua bentuk hambatan harus dikurangi, bahkan dihapus. Walaupun sampai saat ini belum ada kesepakatan baru yang dihasilkan, nuansa yang berkembang bergerak kearah reformasi perdagangan. Dalam hal ini, Indonesia dan negara-negara lain harus bersedia mereformasi kebijakan perdagangannya. Untuk itu, diperlukan kajian tentang dampak reformasi kebijakan perdagaa-

ngan pemerintah Indonesia, khususnya terhadap perekonomian, dan harga keekonomian gula.

Masalah yang akan dihadapi Indonesia adalah jika harus melakukan reformasi perdagangan dengan membuka akses pasar untuk gula. Fasalnya, diperkirakan, dampak yang ditimbulkan akan sangat serius, jika reformasi itu tidak dilakukan secara hati-hati berdasarkan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan kajian dampak hambatannya terhadap perkembangan struktur ekspor gula, industri pengolahan dan usaha tani tebu sehingga dari hasil kajian ini diharapkan akan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk pengembangan komoditas gula. Sebabnya, berdasarkan kebijakan tarif impor SKMenperindag No.230/MPP/Kep/6/1999 yang memberlakukan tarif impor gula sebesar 20% untuk gula mentah (*raw sugar*) dan 25% untuk gula putih (*white sugar*), maka walaupun masih menimbulkan kontroversi, kebijakan tarif impor ini secara bertahap dapat mengangkat harga gula di pasar domestik (Susila dan Susmiadi, 2000).

Tekanan terus-menerus terhadap industri gula domestik serta meningkatnya kesadaran bahwa negara lain melakukan proteksi yang cukup intensif, pemerintah mengembangkan Kebijakan Proteksi dan Promosi. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan medan persaingan yang lebih adil

bagi industri gula dalam negeri. Untuk itu, pada pertengahan tahun 2002, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan impor dengan membatasi importir hanya menjadi importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT) serta membatasi volume gula impor. Gula yang diimpor oleh importir-produsen hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri dari IP tersebut, bukan untuk diperdagangkan. Di sisi lain untuk menjadi IT, bahan baku dari PG milik IT minimal 75% berasal dari petani. Kebijakan ini dituangkan dalam Kepmenperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002. Esensi lainnya yang penting dari kebijakan tersebut adalah bahwa impor gula akan diijinkan bila harga gula di tingkat petani mencapai minimal Rp 3.100 per kg. Pemerintah juga menetapkan tarif spesifik untuk impor gula mentah sebesar Rp 550 per kg (setara 20%) dan gula putih Rp 700 per kg (setara 25%) yang berlaku hingga sekarang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan harga di dalam negeri sehingga produksi gula nasional menjadi lebih kompetitif untuk merangsang petani menanam tebu.

Pada tanggal 17 September 2004, kebijakan tataniaga impor direvisi untuk mempertegas atau memperkuat dari esensi kebijakan melalui SK 522/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. Importir terdaftar gula yang mendapatkan ijin impor tidak boleh mengalihkan impor gulanya ke

perusahaan lain, namun boleh bekerjasama. Pemerintah menetapkan kualitas gula (gula rafinasi, gula putih dan gula mentah) yang boleh diimpor oleh importir produsen (IP). IT yang mengimpor gula harus menyangga gula di tingkat petani sebesar Rp 3.400/kg. Secara implisit, IT mempunyai kewajiban yang lebih jelas untuk menjamin bahwa harga gula di tingkat petani minimal Rp 3.400/kg. Selain itu, pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengenakan larangan impor gula mulai April sampai Juli, yang kemudian diperpanjang sampai Desember 2004. Pelarangan impor itu dimaksudkan agar penawaran komoditas tersebut tidak berlebihan yang dapat menurunkan harga dalam negeri sehingga petani menjadi kurang bergairah untuk memproduksi komoditi tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada tingkat mikro, yaitu dilakukan di lokasi contoh Kabupaten Klaten, sebagai salah satu sentra produksi gula di Jawa Tengah. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden, dengan rincian sebagai berikut: Petani 45, pedagang 8, pengolah 2, importer 3, melalui kombinasi kuesioner terstruktur dan terbuka, sehingga memperoleh informasi yang cukup bervariasi. Sumber data lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan juga dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pimpinan instansi terkait seperti Kepala Dinas

Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, pimpinan BULOG serta pimpinan instansi lainnya.

Analisis Data

Penurunan harga produsen sebagai akibat turunnya harga grosir (turun atau hapusnya tarif impor), akan menurunkan keuntungan petani. Dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*) maka turunnya keuntungan usahatani hanya disebabkan oleh turunnya harga produsen. Perubahan keuntungan usahatani dihitung dengan rumus :

$$dK = K2 - K1$$

$$K1 = QY \times PF1 - TC$$

$$K2 = QY \times PF2 - TC$$

di mana :

dK = Perubahan keuntungan usahatani (Rp/ha)

$K1$ = Keuntungan usahatani sebelum perubahan tarif (Rp/ha)

$K2$ = Keuntungan usahatani sesudah perubahan tarif (Rp/ha)

QY = Produksi (kg/ha)

$PF1$ = Harga produsen sebelum perubahan tarif (Rp/kg)

$PF2$ = Harga produsen sesudah perubahan tarif (Rp/kg)

TC = Total biaya usahatani (Rp/kg)

Tujuan utama penelitian ini adalah mengestimasi dampak penghapusan kebijakan proteksi terhadap ekonomi mikro-usahatani. Selain itu, meng-

estimasi dampak reformasi perdagangan terhadap pendapatan usahatani tebu, serta strategi dan kebijakan perdagangan untuk menghadapi serbuan impor sehingga para petani gula tetap eksis dan mampu mengembangkan usaha tebunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Perdagangan di Tingkat Mikro (Usahatani) :

Dengan adanya perubahan tarif impor yang merubah harga domestik, maka harga output di tingkat petani juga akan berubah melalui proses transmisi harga. Penurunan atau penghapusan tarif impor akan menurunkan harga produsen. Dampak penurunan tarif impor terhadap harga produsen dipengaruhi oleh elastisitas transmisi tarif ke harga grosir dan elastisitas transmisi harga grosir ke harga produsen. Turunnya harga produsen selanjutnya akan menurunkan penerimaan kotor (nilai produksi) dan keuntungan usahatani. Jika tingkat penurunan keuntungan ini sangat besar atau bahkan menjadi negatif (rugi) maka petani tidak akan bergairah lagi untuk menanam komoditas yang bersangkutan sehingga produksi atau bahkan eksistensi usahatani komoditas gula akan terancam. Jika tarif memang harus dihilangkan, maka dampaknya harus diimbangi dengan penemuan teknologi baru (*technology breakthrough*), terutama *bio-technology* (penemuan varietas baru dengan kapasitas produksi lebih tinggi). Kondisi yang lebih baik bagi petani,

dicapai jika tarif impor tidak diturunkan dan dalam waktu yang sama terjadi perbaikan teknologi.

Potret Usahatani Tebu

Pola budidaya yang dipraktekkan dalam usahatani tebu meliputi tanam awal (*plant cane*, PC) dan keprasan (*ratoon*, R). Kedua pola tersebut dibedakan berdasarkan jenis bibit. Pola PC menggunakan bibit berupa tanaman baru dari kebun bibit datar yang dapat diusahakan sendiri maupun dibeli dari pihak lain. Sementara pola R diusahakan dengan memelihara tunas baru yang tumbuh sesudah tebu sebelumnya dipanen/dikepras. Perbedaan kemurnian sifat dari bibit yang digunakan tersebut berpengaruh terhadap sifat-sifat unggul yang berkaitan dengan produktivitas. Semakin jauh dari kemurnian sifat bibit, sifat produktif pada tanaman tebu dewasa akan semakin tidak muncul. Seperti halnya pada jenis lahan, pola tanam juga diduga berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Biaya dan Pendapatan Usahatani tebu di lokasi contoh, dikelompokkan berdasarkan jenis lahan yang diusahakan, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan. Selanjutnya, pada masing-masing jenis lahan dibedakan lagi menurut pola tanam, seperti pola tanam awal dan keprasan.

1. Analisis Usahatani Tebu Lahan Sawah vs Tebu Lahan Tegalan

Dalam analisis ini, usahatani tebu

dikelompokkan berdasarkan jenis lahan, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan, tanpa melihat lokasi dan pola tanam. Hasil analisis untuk Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 1 di mana diketahui bahwa usahatani tebu di lahan sawah dan lahan tegalan, memberikan keuntungan masing-masing sebesar Rp 6,46 juta dan Rp 0,64 juta per hektar per tahun, dengan rasio penerimaan terhadap biaya (*RCR*, *Revenue cost ratio*) masing-masing 1,9 dan 1,1. Dari jumlah keuntungan absolut, usahatani tebu di lahan sawah memberikan pendapatan lebih besar dari lahan tegalan. Demikian pula, dari nilai *RCR*, efisiensi usahatani tebu di lahan sawah lebih tinggi dibanding di lahan tegalan. Keuntungan petani akan lebih besar lagi jika menggarap lahan sendiri (tidak menyewa lahan) dimana biaya sewa lahan sawah dan tegalan cukup besar, yaitu masing-masing Rp 2,16 juta dan Rp 0,80 juta per hektar per tahun.

Usahatani tebu yang bersifat intensif dan padat modal (Simatupang *et al.*, 2003) memerlukan curahan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena keterbatasan jumlah tenaga kerja dalam keluarga, maka sebagian besar pekerjaan usahatani tebu diserahkan ke tenaga kerja luar, yang umumnya dengan sistem upahan harian maupun dilakukan dengan sistem borongan. Hal ini tercermin pada jumlah penggunaan HOK tenaga dalam keluarga yang sangat kecil. Alokasi biaya tenaga kerja luar keluarga untuk tebu sawah sebelum panen

mencapai 40,9 persen dari total biaya, sementara untuk tebu tegalan mencapai 28,2 persen. Saat panen tiba, petani menyerahkan kegiatan panen yang meliputi tebang dan angkut kepada pihak PG. Biaya panen untuk tebu sawah mencapai 40,3% dari total biaya, sementara untuk tebu tegalan sekitar 30,6%. Lokasi sawah yang umumnya beririgasi dan berada di sekitar pemukiman serta dilengkapi dengan kondisi jalan yang memadai memberi kemudahan dalam pelaksanaan tebang dan angkut, sehingga proporsi biaya sebelum dan sesudah panen relatif seimbang. Sebaliknya, lahan tegalan biasanya jauh dari pemukiman, sehingga pemanenan harus dimulai dari areal tebu yang berlokasi di pinggir jalan sebagai pembuka jalan menuju areal tebu yang berada di tengah dan ujung. Karena tingkat kesulitan pengangkutan, maka biaya tenaga untuk panen tebu di lahan tegalan lebih besar dibanding sebelum panen. Tingginya komponen biaya ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usaha peningkatan keuntungan usahatani tebu (Irawan dan Budiman, 1991).

Diamping biaya tenaga kerja, terdapat juga biaya lain-lain yang meliputi sewa lahan, PBB, dan iuran. Biaya lain-lain untuk tebu sawah mencapai 32,4 persen dari total biaya, dimana biaya sewa merupakan 28,0 persen dari total biaya. Artinya petani tebu sawah sebagian besar merupakan petani

penyewa sekaligus penggarap. Biaya PBB yang cukup besar mencerminkan bahwa lahan sawah adalah lahan produktif untuk tanaman pertanian. Kecenderungan yang sama terjadi pada tebu di lahan tegalan, di mana sebagian besar petani adalah penyewa-penggarap dan biaya lain-lain mencapai 13,8% dari biaya total yang didalamnya terdapat biaya sewa lahan sebesar 10,8% dari total biaya. Selain biaya sewa dan PBB, petani juga mengeluarkan biaya iuran dan biaya lainnya. Menurut persepsi petani tebu di Kabupaten Klaten, iuran itu adalah iuran anggota APTRI yang dipungut secara langsung di PG sebesar Rp10/ku tebu. Sementara untuk biaya lainnya adalah biaya iuran irigasi lahan menurut aturan kelompok masing-masing.

Secara umum, produktivitas tebu sawah dan tegalan di Kabupaten Klaten rendah, yaitu masing-masing sekitar 6.435 kg dan 3.961 kg gula per hektar per tahun. Rendahnya persentase tebu yang menjadi gula berimplikasi pada tingginya bahan mentah yang menjadi tetes. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh tingkat penggunaan input yang rendah. Tanam awal untuk tebu lahan sawah hanya menggunakan bibit sebanyak 130 kg (2,0%), sementara tebu lahan tegalan sebanyak 190 kg (2,9%). Menurut teknik budidaya tebu anjuran, jumlah bibit adalah 6,5–7,5 ton per hektar. Apabila harga bibit rata-rata per kuintal adalah Rp 20.000, maka petani harus mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit sebesar Rp. 1,3–1,5 juta per hektar.

Tabel 1 : Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu Sawah dan Tegalan per Hektar per Tahun di Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), 2004.

Uraian		Jenis Lahan	
		Sawah (n = 15)	Tegalan (n = 30)
A	Total Biaya (Rp)	7.719.078	7.367.579
1.	Saprodi		
	a. Benih (Kg)	130	190
	b. Pupuk		
	- Urea granula (Kg)	174,11	195,35
	- Urea tablet (Kg)	85,69	31,85
	- SP – 36 (Kg)	121,84	46,44
	- KCl (Kg)	88,69	5,00
	- ZA (Kg)	783,18	873,21
	- NPK (Kg)	0	58,46
	- Lainnya (Kg)	0	0
	- Cair (Lt)	0	0
	- Alternatif (Kg)	0	0
	- Kandang (Kg)	617,00	479,00
	c. Pestisida		
	- Cair (Lt)	0	0
	- Padat (Kg)	3,54	4,50
2.	Tenaga Kerja		
	a. Prapanen		
	- TKDK (HOK)	8,28	46,95
	- TKLK Harian (HOK)	4,80	8,50
	- TKLK Borongan (Rp)	3.160.431	2.077.034
	b. Panen		
	- TKDK (HOK)	0	0
	- TKLK Harian (HOK)	0	0
	- TKLK Borongan (Rp)	3.108.273	2.251.123
3.	Lain-lain	2.499.230	1.016.411
	- Sewa lahan (Rp)	2.161.045	795.185
	- PBB (Rp)	87.708	79.114
	- Iuran (Rp)	249.265	140.871
	- Lainnya (Rp)	1.211	1.241
B	Total Penerimaan (Rp)	14.176.515	8.007.200
	Produksi Tebu		
	- Hablur (Ku)	64,35	39,61
	- Tetes (Kg)	965.613	606.279
C	Total Keuntungan	6.457.437	639.621
	Revenue-Cost Ratio (RCR)	1,80	1,10

Sumber: Data primer, 2004 (diolah).

Oleh karena itu, guna menghemat biaya, petani lebih banyak menggunakan pucuk tebu untuk bibit dan tidak membeli bibit dari kebun bibit dari PG atau pembudidaya bibit tebu.

Selain rendahnya tingkat penggunaan bibit murni, petani juga melakukan pemupukan yang tidak sesuai dengan dosis anjuran. Dosis pupuk per hektar yang dianjurkan adalah 700–800 kg untuk ZA, 100–300 kg untuk KCl, dan 200–400 kg untuk SP-36 (Anonim, 2001). Namun pada kenyataannya, petani memupuk dengan dosis ZA, KCl, dan SP-36 untuk tebu lahan sawah masing-masing sebesar 97,9%, 44,3%, dan 40,6% dari dosis pemupukan berimbang anjuran. Meskipun tidak dianjurkan, justru petani menggunakan Urea (259,8 kg/ha) dengan tujuan agar berat tebu meningkat (Simatupang *et al.*, 2003). Petani tebu lahan tegalan juga melakukan pemupukan ZA, KCl, dan SP-36, dengan dosis masing-masing sebesar 109,2%, 2,5% dan 15,5% dari dosis pupuk berimbang sesuai anjuran, serta menggunakan Urea rata-rata 227,2 kg dan NPK 58,46 kg per hektar.

Penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang, seharusnya dikompensasi dengan penggunaan pupuk organik (pupuk kandang). Tetapi pada kenyataannya, pemberian pupuk kandang oleh petani masih sangat kurang, yaitu sekitar 1 ton, baik untuk tebu lahan sawah maupun tebu lahan tegalan. Menurut keterangan Ketua APTRI Kabupaten

Klaten, kebutuhan pupuk kandang adalah 5 ton per hektar. Sementara itu, tingkat penggunaan pestisida cair tidak ada, dan pestisida padat masih rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa tanaman tebu petani tidak mempunyai masalah hama atau petani memang tidak bersemangat dalam usaha pengendalian hama, seperti halnya dalam kasus pemupukan berimbang yang dianjurkan.

2 Analisis Pola Usahatani Tebu Tanam Awal vs Tebu Keprasan :

Berdasarkan pola tanam, usahatani tebu dibedakan menurut tebu tanam awal dan tebu keprasan. Hasil analisis usahatani tebu di Kabupaten Klaten seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klaten tebu tanam awal belum memberikan keuntungan (RCR=0,8). Oleh karena itu, hanya sedikit petani yang mengusahakannya. Sedangkan tebu keprasan memberi keuntungan sampai dengan 110% (RCR=2,1) sehingga tebu keprasan lebih banyak diusahakan. Penyebab terjadinya kerugian usahatani tebu tanam awal di Kabupaten Klaten disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang besar sebelum panen, yaitu 35,7% dari total biaya, sementara untuk biaya panen hanya 18,5% dari total biaya. Tebu tanam awal memang memerlukan biaya persiapan lahan (pembuatan got dan guludan) serta persiapan tanam (pembuatan lubang tanaman, pengangkutan bibit, dan pemasangan ajir). Pekerjaan-pekerjaan

tersebut tidak ditemui dalam aktivitas sebelum panen pada tebu keprasan, sehingga perbedaan antara biaya sebelum panen (36,4%) dan saat panen (42,4%) tidak terlalu mencolok. Alasan alokasi biaya tenaga kerja yang besar sebelum dan sesudah panen untuk tebu keprasan pada tebu sawah dan tebu tanam awal adalah relatif serupa.

Alokasi biaya usahatani tebu, selain untuk membayar tenaga kerja luar keluarga adalah biaya lain-lain yang meliputi sewa lahan, iuran, PBB, dan lainnya. Biaya lain-lain, khususnya lahan untuk tebu tanam awal di Kabupaten Klaten mencapai 27,4% dari total biaya, sementara untuk tebu keprasan mencapai 20,6%. Proporsi biaya terbesar dalam unit biaya lain-lain, adalah biaya sewa lahan yang mencapai 94,0% (25,7% dari total biaya tanam awal) dan 79,0% (16,3% dari total biaya keprasan), biaya sewa lahan tebu di Klaten yang ternyata sudah cukup tinggi. Usahatani tebu di lahan kelas tanah berpotensi terkena biaya PBB tinggi serta mengalami persaingan dalam pemanfaatannya, baik antar calon penggarap (pemilik dan penyewa), antar kepentingan (pertanian dan non pertanian) maupun antar komoditas (tebu dan non-tebu). Pemikiran tersebut muncul karena menurut Soentoro *et al.* (1999), kelayakan usahatani tebu menimbulkan kompetisi pasar lahan antar komoditas. Penjelasan tentang biaya iuran dan lainnya sejalan dengan penjelasan biaya usahatani berdasarkan jenis lahan.

Produktivitas tebu tanam awal dan keprasan di Kabupaten Klaten, menunjukkan kecenderungan yang sama. Produktivitas tebu tanam awal di Kabupaten Klaten (41,75 ku gula/ha) lebih rendah daripada tebu keprasan, yaitu 56,63 ku gula/ha. Apabila dirunut menurut jenis lahan tampaknya tebu keprasan merupakan tebu sawah, sementara tebu tanam awal merupakan tebu tegalan. Hal ini tercermin dari kecenderungan produktivitas di antara kedua kategori analisa tersebut yang cukup sejalan. Artinya, kinerja usahatani tebu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air irigasi. Dalam masa pertumbuhannya, tanaman tebu mengalami masa basah dimana tanaman memerlukan air yang cukup untuk mencapai tingkat kemasakan tertentu. Tingkat kemasakan yang optimal sangat berpengaruh terhadap tingkat rendemen, dan tingkat rendemen akan menentukan produktivitas tebu dan hasil gula yang diperoleh. Tingkat penggunaan bibit pada tebu tanam awal di Kabupaten Klaten rendah (2,3% dari anjuran), sementara untuk tebu keprasan tingkat penggunaan bibit baru untuk penyulaman (penggantian tanaman lama yang mati) sangat rendah (kurang dari 1%).

Pemupukan untuk kedua pola tanam tebu menunjukkan kecenderungan yang sama dengan kinerja pemupukan menurut jenis lahan. Secara agregat tingkat pemupukan tebu terlihat lebih baik. Petani Kabupaten Klaten menggunakan pupuk ZA, KCl, dan SP-36

Label 2 : Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu Tanam Awal dan Keprasan per Hektar per Tahun di Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), 2004.

Uraian		Pola Tanam	
		Tanam Awal (n = 5)	Keprasan (n = 41)
A.	Total Biaya (Rp)	12.022.369	6.108.898
1.	Saprodi		
	a. Benih (Kg)	151,00	0
	b. Pupuk		
	- Urea granula (Kg)	277,48	172,80
	- Urea tablet (Kg)	111,11	41,17
	- SP – 36 (Kg)	60,00	76,12
	- KCl (Kg)	80,00	29,28
	- ZA (Kg)	799,70	842,58
	- NPK (Kg)	0	42,78
	- Lainnya (Kg)	0	0
	- Cair (Lt)	0	0
	- Alternatif (Kg)	0	1,00
	- Kandang (Kg)	380,00	530,00
	c. Pestisida		
	- Cair (Lt)	0	0
	- Padat (Kg)	10,27	3,34
2.	Tenaga Kerja		
	a. Prapanen		
	- TKDK (HOK)	0	37,38
	- TKLK Harian (HOK)	25,20	4,90
	- TKLK Borongan (Rp)	4.292.111	2.226.657
	b. Panen		
	- TKDK (HOK)	0	0
	- TKLK Harian (HOK)	0	0
	- TKLK Borongan (Rp)	2.228.157	2.589.098
3.	Lain-lain	3.292.486	1.260.291
	- Sewa lahan (Rp)	3.094.444	995.097
	- PBB (Rp)	85.411	82.488
	- Iuran (Rp)	111.089	180.997
	- Lainnya (Rp)	1.542	1.709
B.	Total Penerimaan (Rp)	9.409.009	12.681.027
	Produksi Tebu		
	- Hablur (Ku)	41,75	56,63
	- Tetes (Kg)	595.014	750.964
C.	Total Keuntungan	-2.613.360	6.572.128
	Revenue-Cost Ratio RCR)	0,80	2,10

Sumber: Data primer, 2004 (diolah).

masing-masing 100%, 40%, dan 20% dari dosis pemupukan berimbang anjuran, 388,6 kg/ha pupuk Urea, 130 kg/ha pupuk kandang, serta 10,27 kg/ha pestisida padat untuk mengendalikan hama pada tebu tanam awal. Sementara untuk tebu keprasan digunakan pupuk ZA, KCl, dan SP-36 sebanyak masing-masing 105,3%, 14,6%, dan 25,4% dari dosis pemupukan berimbang anjuran, 214,0 kg/ha pupuk Urea, 42,78 kg/ha pupuk NPK, 1 kg/ha pupuk alternatif, 530 kg/ha pupuk kandang, dan 3,34 kg/ha pestisida padat untuk pengendalian hama.

3 Perbandingan Analisis Usahatani Tebu Melalui Kombinasi Lahan dan Pola Tanam

Analisis usahatani tebu berdasarkan pola tanam secara agregat sudah dibahas di muka. Pembahasan selanjutnya akan membandingkan kedua pola tanam tersebut untuk masing-masing jenis lahan di kedua propinsi. Hasil analisis total biaya, pendapatan, keuntungan, produktivitas gula hablur, dan nilai RCR usahatani tebu tanam awal dan keprasan pada lahan sawah dan tegalan di disajikan dalam Tabel 3. Dari Tabel 3. dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klaten secara agregat total biaya usahatani tertinggi terjadi pada tebu lahan sawah tanam awal yaitu Rp. 12.096.595 per hektar. Sementara biaya terendah terjadi pada tebu lahan sawah keprasan ke lima, yaitu Rp.4.384.306 per hektar. Usahatani yang memberi total

penerimaan tertinggi adalah tebu lahan sawah keprasan ke empat, yaitu Rp 18.814.481 per hektar. Sementara penerimaan terendah terjadi pada tebu lahan tegalan tanam awal yang hanya mencapai Rp 6.474.262 per hektar. Jumlah keuntungan ternyata tidak selalu sejalan dengan jumlah biaya dan penerimaan secara agregat. Tebu lahan sawah keprasan memberikan penerimaan tertinggi dan tetap memberi keuntungan tertinggi pula, yaitu Rp. 11.703.938 per hektar. Tebu lahan sawah tanam awal memerlukan biaya paling besar tetapi keuntungannya bukan yang terendah. Keuntungan terendah ditunjukkan oleh kerugian yang dialami oleh tebu tegalan tanam awal sebesar Rp. 5.473.880 per hektar.

Berdasarkan jumlah biaya dan penerimaan dari masing-masing kriteria usahatani tebu, tebu lahan sawah keprasan ke lima justru menunjukkan tingkat efisiensi usaha tertinggi dengan nilai RCR sebesar 3,3. Efisiensi terendah ditunjukkan oleh tebu lahan tegalan tanam awal dengan nilai RCR sebesar 0,5 (rugi), yang mencerminkan ketidakmampuan usahatani mencapai titik impas usaha, seperti pada tebu lahan sawah tanam awal (RCR = 1).

Efisiensi usahatani sangat terkait dengan peningkatan penerimaan. Penerimaan usahatani dipengaruhi oleh tingkat produktivitas tanaman. Tampak dalam Tabel 4, tebu lahan sawah keprasan mengalami peningkatan

2. Sistem Pemasaran Gula

Implementasi dari SK Menperindag No.643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula sangat menjamin petani dari gejolak harga gula. SK tersebut antara lain mengatur tentang dana talangan. Dana talangan ini merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada petani dan PTPN/RNI guna menjamin pendapatan petani tidak kurang dari Rp. 3.410/kg gula pasir yang dijual. Dana talangan diberikan kepada petani pada setiap akhir periode sebelum diadakan lelang. Sejak diimplementasikan sistem dana talangan untuk gula petani, maka struktur harga dan hasil penjualan gula secara umum dapat dirangkum dalam Gambar 1.

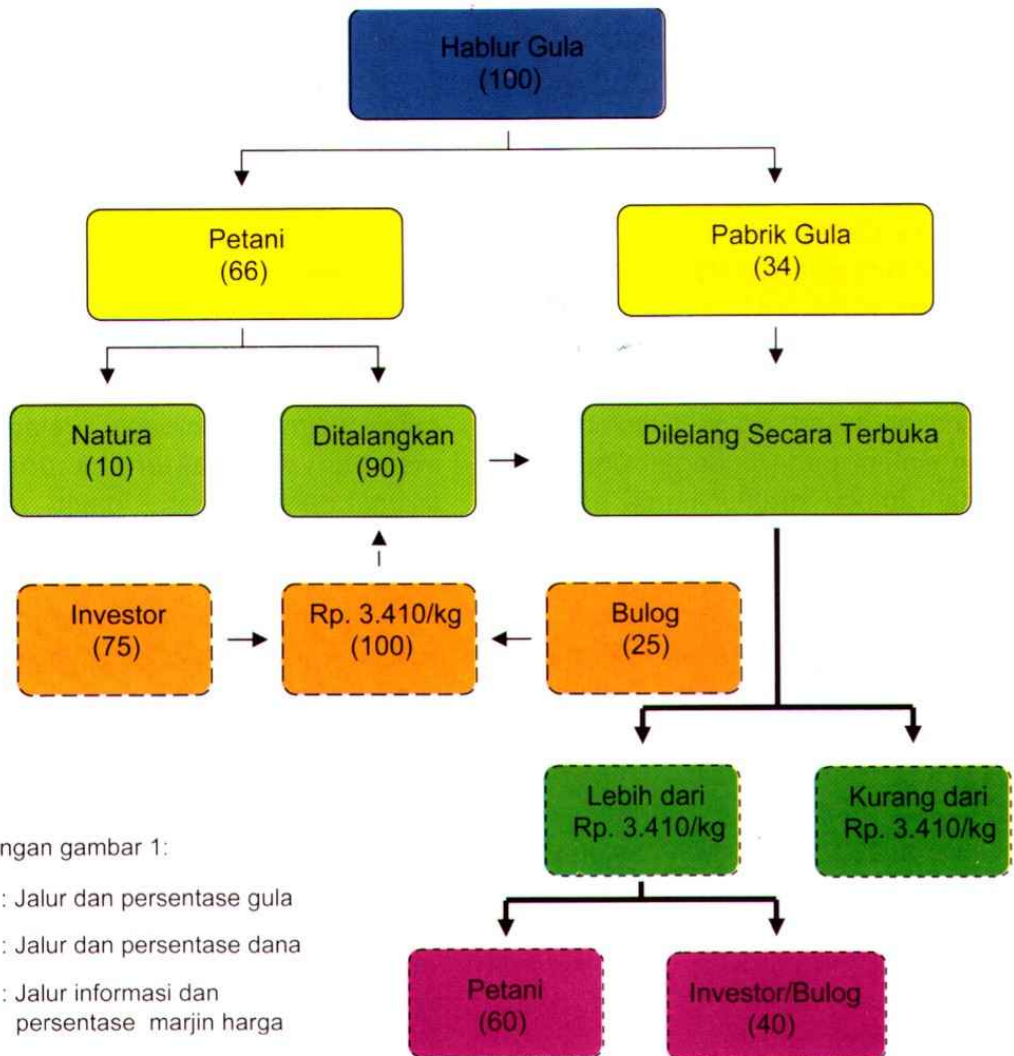
Menurut nota kesepahaman tentang penyerapan gula pasir produksi PTPN IX, X, XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tertulis bahwa BULOG akan menyediakan dana talangan bagi PTPN/RNI maupun petani melalui PTPN/RNI yang cukup untuk menyerap kurang lebih 25 persen dari total perkiraan produksi gula pasir dari pabrik-pabrik milik PTPN/RNI. Produksi gula tersebut berasal dari tebu petani maupun tebu PG dengan harga standar pembelian sebesar Rp. 3.410/kg, yang di dalamnya termasuk PPn gula pasir milik PTPN/RNI dan biaya karung serta PPn biaya karung gula pasir milik petani. Sementara perusahaan atau para pedagang (investor) menyediakan dana talangan untuk menyerap sisanya (75%).

Sebanyak 10% gula bagian petani (dari 66% hablur), diberikan kepada petani dalam bentuk natura (gula pasir) dan sisanya (90% bagi hasil) dibayar dengan harga talangan sebesar Rp. 3.410/kg. Kemudian apabila petani mengambil kredit melalui PG, maka akan langsung dipotong sesuai dengan besarnya kredit yang diambil. Petani yang di lingkungannya terdapat usaha toko kelontong baik milik sendiri, keluarga, maupun penduduk setempat, umumnya membawa pulang gula untuk dijual langsung kepada konsumen karena harga jualnya lebih tinggi. Petani yang mempunyai karakteristik demikian dikenal dengan petani "daun". Namun, tidak jarang karena petani daun kesulitan transportasi atau gula bagiannya terlalu banyak, maka petani menjual DO sebagian gulanya kepada pedagang gula yang ditemuinya di PG.

3. Sistem Lelang Gula

Pelelangan gula PG dan petani PG Gondang Baru dilakukan di kantor pemasaran PTPN IX di Surakarta, sementara untuk gula petani dan PG Ngadirejo dilakukan di kantor pemasaran PTPN X di Surabaya dengan mengundang para pedagang. Lelang dilakukan secara terbuka yang difasilitasi pihak PG dengan mengundang petani maupun pedagang. Sebagian besar pedagang adalah investor dana talangan. Apabila harga lelang sudah disepakati, maka akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan berikut : 1. Apabila harga lelang di bawah

Gambar 1 : Skema Jalur dan Persentase untuk Gula, Dana Talangan, dan Harga Lelang Gula Berbagai Stakeholder.



harga talangan (Rp 3.410/kg), petani tetap akan menerima harga sebesar dana talangan tersebut, dan 2. Apabila harga lelang di atas harga talangan, maka kelebihan harga tersebut didistribusikan dengan *sharing margin* 60 persen untuk

petani dan 40% untuk investor/BULOG (Gambar 2). Realisasi harga lelang gula selama Juni sampai dengan Agustus 2004 berkisar Rp 3.436 sampai dengan Rp 3.590 atau rata-rata Rp 3.477/kg gula.

DAMPAK REFORMASI PERDAGANGAN

Dekomposisi Tarif

Strategi yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk melindungi industri gula Indonesia adalah strategi defensif. Ada dua instrumen kebijakan yang digunakan, yaitu :1. Pengenaan tarif bea masuk advalorem sebesar 20 persen untuk gula mentah dan 25 persen untuk gula putih pada tahun 2000 – 2001, kemudian diubah menjadi tarif spesifik yaitu Rp 550 per kg untuk gula mentah dan Rp 700 per kg untuk gula putih sejak 2002 sampai saat penelitian uini dilaksanakan (2004); dan 2. Kebijakan non-tarif berupa pengaturan, pengawasan dan pembatasan impor gula yang mempunyai dampak menaikkan harga. Kebijakan (1) disebut pengenaan “Tarif Eksplisit” (TE), sedangkan kenaikan harga akibat kebijakan (2) disebut “Tarif Implisit” (TI).

Kenaikan harga dalam negeri sebagai akibat kedua kebijakan tersebut tercermin pada selisih antara harga paritas impor gula di tingkat grosir (PIP) dan harga gula aktual di tingkat grosir (PWS). Hasil analisis (Tabel 4.21) menunjukkan bahwa PIP adalah Rp 2.201 per kg, sedangkan PWS adalah Rp 3.707 per kg. Selisih kedua harga ini adalah Rp 1.505 (68,34% dari PIP) yaitu kenaikan harga gula sebagai dampak dari kedua kebijakan protektif tersebut. Oleh karena tarif eksplisit rata-rata

adalah Rp 625 (28,38% dari PIP), maka kenaikan harga sebesar Rp 880 (39,96% dari PIP) yaitu Rp 1.505 dikurangi Rp 625, adalah TI akibat kebijakan (2).

Berdasarkan dekomposisi tarif tersebut, maka dibuat tiga skenario kebijakan perdagangan (impor), yaitu :

Skenario A : Seluruh tarif impor eksplisit dan tarif impor implisit (Rp 615/kg) dihapus, sesuai dengan kesepakatan AoA-WTO tentang perluasan akses pasar. Ini berarti bahwa perdagangan menjadi sepenuhnya liberal.

Skenario B : Seluruh tarif implisit (Rp 880/kg) dipertahankan, sedangkan seluruh tarif eksplisit (Rp 430/kg) dihapus. Ini berarti pemerintah masih menggunakan instrumen non-tarif saja untuk melakukan proteksi.

Skenario C : Seluruh tarif implisit (Rp 880/kg) dihapus, sedangkan seluruh tarif eksplisit (Rp 625/kg) dipertahankan. Ini berarti pemerintah hanya menggunakan instrumen tarif saja untuk melakukan proteksi.

Dampak Mikro

Kebijakan perdagangan tidak hanya berdampak pada ekonomi komoditas pada tingkat makro nasional, tetapi juga pada tingkat mikro usahatani melalui mekanisme perubahan harga output. Dari analisis sebelumnya dapat diketahui bahwa ketiga skenario kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi harga grosir dan melalui mekanisme transmisi harga, perubahan harga grosir akan berdampak pada harga produsen. Perubahan harga produsen yang terjadi pada gula untuk masing-masing skenario, sebagaimana telah diungkapkan di atas adalah bahwa harga gula per kg di tingkat petani akan turun dari posisi awal Rp 3.410 menjadi Rp 1.461,3 untuk Skenario A, Rp 2.600,7 untuk Skenario B dan Rp 2.270,6 untuk Skenario C.

Perubahan harga tersebut akan membawa perubahan pada nilai produksi yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan bersih usahatani. Dalam analisis ini, usahatani tebu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tebu tanam awal dan tebu keprasan, baik pada lahan sawah maupun lahan tegalan. Dalam hal ini, angka-angka untuk tebu keprasan merupakan rata-rata dari berbagai frekuensi Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel 4, untuk tebu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dari Tabel 4, dapat diketahui

bahwa keuntungan usahatani tebu di Kabupaten Klaten untuk tanam awal lebih kecil daripada keprasan. Hal ini disebabkan biaya untuk tanaman awal yang digunakan untuk persiapan lahan, bibit dan tanam sangat besar, sedangkan pada tanaman keprasan biaya-biaya ini tidak diperlukan lagi (kalaupun ada hanya penyulaman tunas yang mati). Bahkan keuntungan usahatani tanaman awal pada lahan tegalan di Kabupaten Klaten negatif cukup besar.

Semua skenario kebijakan menyebabkan keuntungan usahatani tebu mengalami penurunan sangat besar. Di Kabupaten Klaten, semua skenario kebijakan menyebabkan keuntungan usahatani tanaman awal berubah menjadi negatif, yang berarti petani menderita kerugian, baik di lahan sawah maupun tegalan. Sedangkan untuk tanaman keprasan, keuntungan menurun tetapi tidak sampai menjadi negatif.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa petani tebu akan mengalami "kesengsaraan" luar biasa jika seluruh kebijakan proteksi (tarif dan non-tarif) dihapus. Penghapusan kebijakan tarif saja atau non-tarif saja juga masih akan menyebabkan keuntungan petani menurun secara signifikan. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan tarif dan non-tarif yang selama ini diterapkan masih diperlukan untuk melindungi petani tebu dan industri gula nasional.

Tabel 4 : Dampak Kebijakan Perdagangan terhadap Keuntungan Usahatani Tebu per Hektar per Tahun Lahan Sawah dan Tegalan di Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), 2004.

Uraian	Lahan Sawah		Lahan Tegalan	
	Awal	Kepras	Awal	Kepras
Biaya (Rp)	12095595	6624699	11948143	5077297
Penerimaan to (Rp)	12343755	14634706	6474262	8773668
Keuntungan to (Rp)	248160	9369773	-5473881	3696371
Harga to (Rp/kg)	3410	3410	3410	3410
Produksi (kg hablur eq)	3620	4690	1899	2573
Dampak Kebijakan :				
Perubahan Harga (%):				
- Skenario A	-57.15	-57.15	-57.15	-57.15
- Skenario B	-23.73	-23.73	-23.73	-23.73
- Skenario C	-33.41	-33.41	-33.41	-33.41
Harga t1 (Rp/kg)				
- Skenario A	1461	1461	1461	1461
- Skenario B	2601	2601	2601	2601
- Skenario C	2271	2271	2271	2271
Penerimaan t1 (Rp)				
- Skenario A	5289299	6853631	2774221	3761874
- Skenario B	9414582	12198984	4937920	6695872
- Skenario C	8219706	10650719	4311211	5846048
Keuntungan t1 (Rp)				
- Skenario A	-6806296	228932	-9173922	734077
- Skenario B	-2681013	5574285	-7010223	3668075
- Skenario C	-3875889	14713526	-7636932	2818252
Perubahan Keuntungan (Rp)				
- Skenario A	-7054456	-9140841	-3700041	-5017295
- Skenario B	-2929173	-3795488	-1536342	-2083297
- Skenario C	-4124049	5343753	-2163051	-2933120
Perubahan Keuntungan (%)				
- Skenario A	-2842.70	-97.56	67.59	-87.24
- Skenario B	-1180.36	-40.51	28.07	-36.22
- Skenario C	-1661.85	57.03	39.52	-51.00

PENUTUP

Untuk melindungi pertanian komoditas substitusi impor, khususnya gula, dari ancaman produk impor luar negeri, pemerintah telah menempuh kombinasi dua instrumen kebijakan protektif, yaitu tarif dan non-tarif. Tarif untuk gula adalah Rp 550/kg untuk gula mentah dan Rp 700/kg untuk gula putih atau rata-rata Rp 625/kg. Kebijakan non-tarif antara lain adalah pengaturan, pengawasan dan pembatasan impor

Kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan pertanian komoditas gula, adalah :

- (1) Mempertahankan kebijakan proteksi yang selama ini ditempuh, yaitu pengenaan tarif impor sebesar, Rp 550/kg untuk gula mentah dan Rp 700/kg untuk gula putih, yang dikombinasikan dengan kebijakan non-tarif, yaitu pengaturan, pengawasan dan pembatasan impor, sebelum negara-negara maju bersedia mengurangi subsidi ekspor dan subsidi domestik yang sangat mendistorsi pasar. Disamping itu, perlu upaya lebih keras untuk mencegah terjadinya penyelundupan impor gula melalui penegakan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang secara bertanggungjawab
- (2) Pengembangan penemuan dan penerapan teknologi budidaya tebu yang dapat meningkatkan produktivitas per hektar secara signifikan, utamanya bibit unggul. Pemberian pupuk berimbang sesuai dengan anjuran yang dikombinasikan dengan pupuk organik akan meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki mutu hasil. Bersamaan dengan itu, perlu pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan ekonomi, penciptaan pasar yang dapat mengangkat harga produsen serta pemberian kredit berbunga terjangkau, guna merangsang petani untuk menerapkan teknologi yang lebih unggul.
- (3) Khususnya untuk tebu dan gula, pemberian bantuan kepada petani sebesar Rp 1,95 juta per hektar untuk bongkar ratoon perlu dilanjutkan, diperluas dan tepat sasaran (petani penerimaannya). Sistem tebang-angkut perlu diperbaiki agar kualitas tebu tidak mengalami degradasi sebelum digiling. Dana yang diperoleh pemerintah dari pajak impor gula dapat dimanfaatkan untuk membantu petani tebu.

Demikian pula peralatan pengolahan gula di PG perlu direhabilitasi agar rendemen gula meningkat sehingga efisiensi PG juga meningkat.

- (4) Peningkatan efisiensi yang signifikan pada agribisnis gula akan dapat memperkuat daya saing komoditas tersebut di pasar domestik guna menangkal serbuan produk impor. Kebijakan proteksi tidak mungkin dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang karena tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan efisiensi budidaya dan proses pengolahan perlu terus dijalankan untuk mempersiapkan agribisnis gula dalam menghadapi serbuan produk impor sejenis. Jika tidak, maka Indonesia akan terasing dari hubungan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1994. Uruguay Round : Schedule XXI – Indonesia (15 April 1994).
- Dradjat, B., R. Suprihatini dan T. Wahyudi. 2003. Analisis Prospek dan Strategi Pengembangan Industri Hilir Perkebunan : Kasus Kakao. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Bogor.
- Erwidodo, Hermanto dan H. Pudjiastuti. 2003. Impor Jagung : Perlukah Tarif Impor Diberlakukan? Jawaban Hasil Simulasi. *Jurnal Agro Ekonomi* 21 (2) : 175-195.
- Erwidodo and P.U. Hadi. 1999. "Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Indonesia : Commodity Aspects". Working Paper 48. The CGPRT Centre. Bogor.
- Feridhanusetyawan, T. dan M Pangestu 2003. Indonesian Trade Liberalisation : Estimating the Gains. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39(1) : 51-74.
- Hadi. P.U., A.H. Malian, A. Djulin, A. Agustian, S.H. Suhartini dan S.H. Susilowati. 2002. Kajian Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia 2001. Laporan Akhir Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian bekerjasama dengan ARMP-II Badan Litbang Pertanian.
- Hadi, P.U. 2000. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Profitabilitas dan Daya Saing Pabrik Minyak Kelapa. *Jurnal Agro Ekonomi* 18(2) : 1-12.
- Hadi, P.U. 2000. Dampak Penghapusan

- Subsidi Benih Terhadap Usahatani dan Usaha Perbenihan Serta Implikasinya Bagi Pengembangan Industri Perbenihan Padi Nasional. Makalah dipersiapkan sebagai respon terhadap permohonan DPP HKTl kepada Menteri Pertanian RI untuk meninjau kembali subsidi benih kepada BUMN Perbenihan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hadi, P.U. dan B. Sayaka. 2000. Kajian Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian Utama 1998-1999. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Hadi, P.U. 1998. Kajian Historis Kebijakan Harga Gabah dan Pupuk serta Implikasi kebijaksanaannya. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hadi, P.U. 1997. Dampak Deregulasi Perdagangan terhadap Pendapatan Usahatani Kedelai di Jawa Timur. Prosiding Agribisnis Dinamika Sumberdaya dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Buku II. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Hal. 279-287.
- Hadi, P.U. 1989. Alternatif Kebijakan Harga untuk Meningkatkan Produksi Padi dan Pendapatan Petani. *Jurnal Agro Ekonomi* 8(2) : 46-63.
- Houck, J.P. 1986. *Element of Agricultural Trade Policies*. Macmillan Publishing Company. New York.
- Katial-Zemany, A. and N.S. Alam. 2002. *Indonesia Sugar Semi-Annual 2002*. GAIN Report, USDA.
- Kindleberger, C.P. and D.H. Lindert. 1982. *International Economics*. Richard D. Irwin. California.
- Pambudy, R., S. Mardianto, N. Pribadi, T.E.H basuki, dan A. Suryana. 2004. *Ekonomi Gula : 11 Negara Pemain Utama Dunia. – Kajian Komparasi dan Perspektif Indonesia*. Sekretariat Dewan Katchewan Pangan. Jakarta, Indonesia.
- Pambudy, R., T.E.H. Basuki, S. Mardianto, A. Jayawinata dan B.P. Wibowo. 2002. *Kebijakan Perberasan di Asia*. Hasil Pertemuan Regional di Bangkok, Thailand, Oktober 2002. Sekretariat Dewan Katchewan Pangan. Jakarta, Indonesia.
- Piggott, R.R., K.A. Parton, E.M., Tredgold and B. Hutabarat. 1993. *Food Price Policy in Indonesia*. Monograph No. 22. ACIAR. Canberra.
- PT. SKA. 2002. *Kajian Fasilitas Proteksi dalam Persetujuan di Bidang Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (AoA – WTO)*. Laporan

Tabel 3 : Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu Tanam Awal dan Keprasan per Hektar per Tahun pada Lahan Sawah dan Tegalan di Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), 2004.

Pola Tanam (N = 45)	N	Total Biaya (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Keuntungan (Rp)	Produktivitas (Ku gula/Ha)	RCR
Lahan Sawah	15					
a. <i>Tanam awal</i>	2	12.096.595	12.343.755	248.160	53,85	1,0
b. <i>Keprasan</i>	13	6.624.699	14.634.706	9.369.773	64,61	2,2
- Kepras 2	4	8.586.324	13.507.521	4.921.197	53,09	1,6
- Kepras 3	3	6.417.620	10.878.129	4.460.509	49,33	1,7
- Kepras 4	5	7.110.545	18.814.483	11.703.938	85,30	2,6
- Kepras 5	1	4.384.306	15.338.689	10.954.383	70,72	3,5
c. <i>Rata-rata sawah</i>		7.719.078	14.176.515	6.457.437	64,35	1,8
Lahan Tegalan	30					
a. <i>Tanam awal</i>	3	11.948.143	6.474.262	-5.473.880	29,64	0,5
b. <i>Keprasan</i>	27	5.077.297	8.773.668	3.696.372	40,66	1,7
- Kepras 3	9	5.599.604	8.688.317	3.088.713	40,47	1,6
- Kepras 4	18	4.554.989	8.859.020	4.304.030	40,85	1,9
c. <i>Rata-rata tegalan</i>		7.367.579	8.007.200	639.621	39,61	1,1
Rataan Tanam Awal	5	12.022.369	9.409.009	-2.613.360	41,75	0,8
Rataan Keprasan	40	6.108.898	12.681.027	6.572.128	56,63	2,1

Sumber: Data primer, 2004 (diolah).

produktivitas yang berfluktuasi, yang juga dialami oleh tebu keparasan di lahan tegalan, seiring dengan intensitas pengeprasan. Kenyataan ini sejalan dengan profil tebu rakyat Jawa Timur yang dilaporkan oleh Rahmat (1992), bahwa secara umum tebu sudah diterima petani sebagai komoditas sumber pendapatan rumah tangga, usahataniya cenderung ekstensif, dan petani

cenderung melakukan pengeprasan secara berulang-ulang. Usahatani yang menunjukkan produktivitas tertinggi adalah tebu lahan sawah keprasan ke empat, yaitu sebesar 85,3 ku gula per hektar, sedangkan produktivitas terendah terjadi pada tebu lahan tegalan tanam awal yaitu 29,64 kuintal gula per hektar.

Secara agregat, produktivitas tebu

lahan sawah lebih besar daripada tebu lahan tegalan, baik tanam awal maupun keprasan. Di lahan sawah, produktivitas tebu tanam awal dan keprasan masing-masing adalah 53,85 ku dan 64,61 ku gula per hektar, sedangkan di lahan tegalan adalah 29,64 ku untuk tanam awal dan 40,66 ku gula untuk keprasan. Implikasinya adalah bahwa dengan meningkatnya proporsi areal tebu tegalan (lihat uraian sebelumnya), maka produktivitas tebu nasional akan menurun. Menurut hasil penelitian P3GI (2002), penurunan produktivitas tiap keprasan mencapai 20 persen dari produktivitas tanaman awal. Intensitas keprasan yang melebihi batas rekomendasi disertai penggunaan pupuk tebu untuk penyulaman akan menambah ketidakmurnian sifat bibit asli, sehingga kualitas tebu yang dihasilkan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam mengatasi penurunan kualitas dan kuantitas tebu yang dihasilkan

Pemasaran Hasil Tebu dan Gula

Terdapat dua macam pemasaran, pertama pemasaran tebu dan yang kedua adalah pemasaran gula. Terdapat sistem pemasaran tebu, namun untuk pemasaran gula pada prinsipnya sama dan mengikuti SK Menperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Gula Impor Gula.

1. Sistem Pemasaran Tebu

Sistem pemasaran tebu di Kabu-

paten Klaten, Jawa Tengah dilakukan dengan dua pola pemasaran, yaitu sistem tebasan dan titip giling. Pola tebasan kebanyakan dilakukan petani mandiri yang tidak memperoleh kredit dari PG. Petani bebas memasarkan tebu yang dihasilkan karena tidak berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada PG. Petani demikian dikenal dengan istilah petani "akar". Penebas tebu petani akar membeli tebu berdasarkan taksiran hasil dari hamparan. Harga jual tebu berkisar Rp. 11.000–18.000/ku tebu. Petani akar akan memperoleh hasil berupa uang tunai tanpa harus menanggung biaya panen dan pascapanen (pengangkutan dan administrasi penggilingan di PG). Penebas selanjutnya menggilingkan tebu ke PG dengan sistem titip giling.

Pola titip giling dilakukan oleh petani pembudidaya yang sekaligus melakukan kegiatan pascapanen tebu menjadi gula di PG. Petani menanggung semua biaya baik panen maupun pascapanen. Sistem titip giling merupakan pola umum yang dilakukan petani dan identik dengan sistem penggilingan gabah. Petani memasukkan tebu ke PG dan upah giling diambil dari hasil bagi gula. Pembayaran upah giling dilakukan dengan sistem bagi hasil gula hablur. Gula bagi hasil untuk petani 66 persen total hablur, sementara untuk PG 34 persen total hablur. Petani tebu yang membudidayakan sekaligus menggilingkan tebu yang dihasilkan ke PG dikenal dengan petani "batang".

- Akhir. PT. Santika Kusuma Agung. Jakarta.
- Ruffler, T. 2003. *Special Products – Thinking Through the Details*. Oxford Policy Management.
- Sawit, M.H. 2004. *GATT, Perjanjian Pertanian (AoA) WTO, dan Paket Huli*. Makalah disampaikan pada Peneliti/Pejabat badan Litbang Pertanian, Bogor, 9 November 2004.
- Simatupang, P. 2003. *Justifikasi dan Metode Penetapan Komoditas Strategis*. Makalah yang belum dipublikasikan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sudaryanto, T., P.U. Hadi, S.H. Susilowati dan E. Suryani. 1999. *Analisis Kebijakan Perdagangan dan Harga Komoditi Pertanian*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- WTO. 1995. *The Results of the Uruguay Round*. World Trade Organization.
- INFORMASI DARI INTERNET :**
1. WTO Agricultural Negotiations : The Issues, and Where We Are Now.
 2. Before the Panel of the World Trade Organization on European Communities – Export Subsidies on Sugar. First Submission of Thailand,. Prepared with the Cooperation of the Advisory Centre on WTO Law, 12 February 2004.
 3. Australia Joins Thai, Brazil, Against EU.
 4. The Bitter Truth of Indonesia's Sugar Smuggling (Bill Guerin).
 5. European Union : Issues and Analysis.
 6. Farm Bill Update (April 2002).
 7. EU : US Bill to Affect Cereals.
 8. Federal Sugar Subsidy a Relic of Depression-Era Politics.
 9. Still in the Dark on the Road to Cancun : Third World Network Report, TWN Africa and Africa Trade Network (Tetteh Hormeku).
 10. Negotiations on Agriculture – First Draft of Modalities for the Further Commitments (Harbinson Text, February 2003).
 11. A Brief Analysis of Harbinson's Text : Post Cancun Ministerial Negotiations on Agriculture : Latest Developments (Parthapratim Pal).

12. The AoA : Institutionalizing Monopolistic Competition – Harbinson Draft, No Relief for Developing Countries. Commission (Tim Rice, Duncan Green, Marita Wiggerthale and Tobias Reichert, October 2003).
13. NGOs Call for Rejection of WTO Agriculture Modalities Paper. Third World Network Report (Goh Chien, February 2003).
14. Statement of the American Farm Bureau Federation to the House Agriculture Committee Regarding World Trade Organization Multilateral Trade Negotiations and Free Trade Agreements (Bob Stallman, June 2003).
15. Post-Cancun Reflections on Agriculture : Joint NGO Submission to the European Commission (Tim Rice, Duncan Green, Marita Wiggerthale and Tobias Reichert, October 2003).
16. APEC Ministers Seek to Revive Doha, Endorse Derbez Draft as Basis for Talks (October 2003).
17. WTO Agriculture Negotiations : 'Derbez Text' Increases Trade Distortions, More Special Treatment for US and EU! (Alleen Kwa, November 2003).
18. Issues and Options in the WTO Post-Cancun Situation.
19. Government Urged not to Allow Subsidy on Sugar export – India.